

## Perjalanan Akuntansi: Indonesia dan China Menuju Standar Global

Natalis Christian<sup>1</sup>, Jenny Edly Sunyoto<sup>2</sup>, Jecelyn Angelica<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Akuntansi, Universitas Internasional Batam

e-mail: [natalis.christian@uib.edu](mailto:natalis.christian@uib.edu)<sup>1</sup>, [2142139.jenny@uib.edu](mailto:2142139.jenny@uib.edu)<sup>2</sup>,  
[2142139.angelica@uib.edu](mailto:2142139.angelica@uib.edu)<sup>3</sup>

### Abstrak

Artikel ini mengkaji perbandingan praktik akuntansi di Indonesia dan China, dengan fokus pada sejarah, budaya, standar akuntansi, penegakan aturan, pengungkapan informasi, audit, dan sistem pajak. Meskipun kedua negara sama-sama menerapkan Standar Akuntansi Internasional (IAS), terdapat perbedaan signifikan yang disebabkan oleh faktor budaya, regulasi, dan sistem perpajakan yang berbeda. Penelitian ini memiliki implikasi manajerial yang penting, yaitu membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, meningkatkan transparansi, dan memperkuat hubungan bisnis antar negara. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang perbedaan praktik akuntansi, menganalisis faktor-faktor yang mendasarinya, dan memperkuat wawasan tentang dampaknya pada perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan perlunya solusi untuk mengatasi perbedaan tersebut, seperti penguatan harmonisasi standar, penegakan aturan yang ketat, peningkatan kapasitas akuntan, dan peningkatan komunikasi antara para profesional akuntansi di kedua negara.

**Kata Kunci:** *Praktik Akuntansi, Indonesia, China, Standar Akuntansi Internasional, Budaya, Regulasi, Sistem Pajak, Implikasi Manajerial, Implikasi Teoritis.*

### Abstract

This article examines the comparison of accounting practices in Indonesia and China, with a focus on history, culture, accounting standards, rule enforcement, information disclosure, auditing, and the tax system. Even though both countries both apply International Accounting Standards (IAS), there are significant differences caused by cultural factors, regulations and different tax systems. This research has important managerial implications, namely helping companies identify risks and opportunities, increase transparency, and strengthen business relationships between countries. Theoretically, this research contributes to the understanding of differences in accounting practices, analyzes the underlying factors, and strengthens insight into their impact on companies. Research findings indicate the need for solutions to overcome these differences, such as strengthening harmonization of standards, strict enforcement of rules, increasing the capacity of accountants, and improving communication between accounting professionals in the two countries.

**Keywords:** *Accounting Practices, Indonesia, China, International Accounting Standards, Culture, Regulations, Tax System, Managerial Implications, Theoretical Implications.*

### PENDAHULUAN

Akuntansi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era kolonial Belanda. Pada masa kolonial, akuntansi digunakan oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia untuk mengatur laporan keuangan mereka. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, perkembangan akuntansi mulai diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia membentuk Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1957 untuk mengatur praktik akuntansi dan memajukan profesi akuntansi di negara ini. Perkembangan akuntansi di Indonesia juga dipengaruhi oleh adopsi standar internasional. Pada awalnya, Indonesia mengadopsi standar akuntansi berbasis pada Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Namun, seiring dengan globalisasi ekonomi dan kebutuhan untuk menarik investasi asing, Indonesia mulai mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang selaras dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Adopsi IFRS dimulai pada tahun 2008 dan diterapkan secara bertahap hingga saat ini, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan perusahaan Indonesia (IAI, 2020).

Selain itu, pendidikan dan pelatihan akuntansi di Indonesia juga telah berkembang pesat. Banyak universitas dan lembaga pendidikan tinggi menawarkan program studi akuntansi yang berkualitas. Asosiasi profesi seperti IAI dan Asosiasi Akuntan Publik Indonesia (IAPI) juga berperan penting dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi dan pelatihan profesional bagi akuntan. Perkembangan ini tidak lepas dari tantangan yang dihadapi, termasuk rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat, ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi, dan kurangnya akuntan yang memiliki sertifikasi profesional. Namun, upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi tantangan tersebut demi menciptakan praktik akuntansi yang lebih baik dan akuntan yang lebih kompeten di Indonesia (Sukoharsono & Gaffikin, 2000).

Akuntansi di Indonesia saat ini telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi modern, didorong oleh peningkatan standar pelaporan keuangan, adopsi teknologi informasi, dan peraturan yang lebih ketat. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia telah sepenuhnya konvergen dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan Indonesia untuk lebih mudah menarik investasi asing dan berpartisipasi dalam pasar global. Oleh karena itu, perusahaan harus transparan mengenai tanggung jawab lingkungannya untuk memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan. (Itan, I., Laudeciska, L., Karjantoro, H., & Chen, R., 2023). Sejarah akuntansi di Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan ini. Pada masa kolonial Belanda, diperkenalkan sistem akuntansi yang lebih formal untuk mendukung administrasi perusahaan-perusahaan Belanda di Hindia Belanda. Ini termasuk pencatatan transaksi yang lebih sistematis dan penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar tertentu. Setelah kemerdekaan, Indonesia membentuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1957, yang kemudian memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengatur praktik akuntansi di negara ini (IAI, 2020).

Sejak adopsi IFRS pada tahun 2008, perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai menyesuaikan laporan keuangan mereka agar selaras dengan standar internasional. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia. Selain itu, pendidikan akuntansi di Indonesia juga mengalami kemajuan pesat. Banyak universitas menawarkan program studi akuntansi dengan kurikulum yang up-to-date dan berorientasi pada praktik internasional. Penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi juga telah menjadi norma. Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan perangkat lunak akuntansi lainnya membantu perusahaan dalam mengotomatisasi dan menyederhanakan proses akuntansi, yang meningkatkan efisiensi dan akurasi. Transformasi digital ini memungkinkan akuntan untuk lebih fokus pada analisis strategis dan pengambilan keputusan berbasis data. Meskipun demikian, tantangan masih ada, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat umum, memperkuat penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan, dan mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah, asosiasi profesi, dan lembaga pendidikan untuk mengatasi tantangan ini dan memajukan profesi akuntansi di Indonesia.

Sejak pendiriannya pada tahun 1949, Republik Rakyat China telah menjadi subjek dari reformasi ekonomi yang signifikan, dimulai pada tahun 1970-an, yang memungkinkannya menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia saat ini. Perubahan

ekonomi ini telah membentuk lanskap sosial, politik, dan ekonomi China modern, mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat China dan memainkan peran penting dalam dinamika global. Fakta menarik tentang China meliputi informasi tentang posisi dan karakteristik geografisnya, seperti Beijing sebagai ibu kota dan penggunaan bahasa resmi Mandarin, serta mata uangnya, Yuan Renminbi (RMB). Dengan populasi yang melebihi 1,4 miliar jiwa, China menjadi negara terpadat di dunia, dengan sejumlah landmark ikonik seperti Tembok Besar China, Kota Terlarang, dan Tentara Terakota, yang menambah kekayaan budaya dan sejarahnya. China juga memiliki posisi sebagai anggota permanen Dewan Keamanan PBB.

Dalam bidang ekonomi, China menduduki peringkat sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan PDB, menjadi pemimpin dalam ekspor global, dan menjadi tempat berdirinya beberapa perusahaan multinasional terbesar seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent. Pertumbuhan ekonominya yang pesat selama beberapa dekade terakhir telah menempatkannya sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan, dengan proyeksi pertumbuhan yang kuat di masa depan. Budaya China dikenal karena kekayaan dan keragamannya, yang mencakup sejarah panjang dan tradisi yang unik, serta keunggulan dalam seni dan sastra yang dihargai secara global. Masakan China juga dikenal sebagai salah satu yang paling populer di dunia, sementara festival dan perayaan tradisional menarik jutaan orang setiap tahunnya. Meskipun prestasi dan kekayaan budayanya, China juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk polusi lingkungan, ketimpangan pendapatan, dan masalah korupsi. Selain itu, negara ini mengalami ketegangan dengan beberapa negara tetangganya terkait masalah teritorial dan maritim. Kritik juga ditujukan kepada pemerintah China terkait catatan hak asasi manusia yang kontroversial.

Pada masa Dinasti Han (206 SM – 220 M), Tiongkok telah memiliki sistem akuntansi yang relatif maju. Sistem ini melibatkan pencatatan transaksi perdagangan, pajak, dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan yang terlatih. Metode pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) belum dikenal saat itu, namun pencatatan transaksi dilakukan dengan cukup detail untuk keperluan administrasi dan perpajakan. Pedagang Cina yang datang ke Nusantara membawa serta praktik akuntansi mereka. Mereka berperan penting dalam perdagangan internasional, menjalin hubungan dagang dengan masyarakat lokal, serta memperkenalkan beberapa metode pencatatan keuangan sederhana. Pengaruh budaya Cina dalam perdagangan dan pencatatan keuangan ini kemudian turut memperkaya praktik akuntansi di Nusantara.

Pada awal tahun 1912, Pemerintah Sementara Republik Cina (1912) membuat rancangan awal dari undang-undang akuntansi untuk akuntansi pemerintah. Pada saat itu situasi keuangan pemerintahan Qing keuangan pemerintah Qing sangat berantakan (Guo, 1988). Kegiatan akuntansi harus bersifat ilmiah, yang berarti bahwa dasar hukum perlu diperkenalkan. Pada bulan Oktober 1914, undang-undang akuntansi Min San diundangkan secara resmi. Pada tahun 1916, dinasti Qing memperkenalkan aturan akuntansi baru tetapi mereka dan pemerintah Nasionalis Cina berikutnya gagal menerapkannya. Pemerintah komunis yang kemudian dengan mudah mengadopsi sistem pelaporan pemerintah pusat yang jauh lebih dekat dengan sistem historis dinasti-dinasti Cina. Baru sejak tahun 1992, sistem akuntansi internasional (barat) telah dilembagakan di Cina. Sejarah akuntansi dapat dilihat sebagai studi tentang perkembangan praktik akuntansi, ide, dan institusi dalam menanggapi perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial (Parker, 1984).

Menurut Guo (1988), dari akhir tahun 1920-an hingga awal 1940-an, industri akuntansi Cina berkembang pesat, karena lingkungan komersial kontemporer, dan perkembangan akuntansi tidak mungkin tercapai tanpa usaha dari para pelopor akuntansi pada saat itu. Pelopor akuntansi seperti Yongzuo Xu (1891-1959) dan Xulun Pan (1893-1985), meskipun mereka bukan pejabat pemerintah dan tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan undang-undang, berpartisipasi dalam perdebatan mengenai 'reformasi' dan 'perbaikan' dan dengan demikian memiliki pengaruh terhadap pengembangan Hukum Akuntansi 1935. Xu dan Pan adalah pelopor industri akuntansi di Tiongkok.

Salah satu tokoh penting dalam perkembangan akuntansi modern Tiongkok adalah Yongzuo Xu. Setelah lulus dengan predikat terbaik dari Shanghai Shenzhou University (sudah tidak ada lagi) pada tahun 1914, ia memulai karirnya sebagai anggota staf *Bank of China* di Tianjin dan pindah kembali ke Shanghai satu tahun kemudian. Xu ditunjuk sebagai salah satu editor *Yinhang Zhoubao (Bank Weekly)* dan menjadi pemimpin redaksi di kemudian hari. Pada tahun 1920, ketika Shanghai Securities and Commodities Exchange Co, Ltd didirikan, Xu ditunjuk sebagai kepala akuntan di departemen akuntansi. Kontribusi utamanya kontribusi utamanya adalah dia menyusun peraturan akuntansi dan membantu melatih yang baru akuntan baru untuk perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode *literatur review*, yaitu dengan meninjau, menelaah, mengklasifikasikan, dan mengategorikan data bukti yang diterbitkan pada artikel-artikel sebelumnya mengenai perbedaan akuntansi di China dan Indonesia. Peninjauan data didapatkan secara sekunder melalui artikel-artikel terakreditasi dan laman resmi lembaga-lembaga yang menyajikan data mengenai kondisi kedua negara tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Akuntansi di negara China**

China adalah negara terbesar ke-3 di dunia, baik berdasarkan luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Terletak di Asia Timur, China berbatasan dengan 14 negara, termasuk Mongolia, Rusia, Korea Utara, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Peradaban China telah berakar selama lebih dari 5.000 tahun, yang mengalami berbagai periode kekaisaran, termasuk pemerintahan oleh kaisar selama berabad-abad, dengan Dinasti Qing sebagai dinasti terakhir yang digulingkan pada tahun 1912. Sejarah China mencatat keterlibatan negara tersebut dalam peristiwa-peristiwa penting seperti Perang Dunia II dan Perang Saudara China, yang berakhir dengan kemenangan komunis pada tahun 1949, yang kemudian memunculkan pendirian Republik Rakyat China di bawah kepemimpinan Mao Zedong.

China telah mengalami transformasi ekonomi yang pesat sejak reformasi ekonomi tahun 1970-an, menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Seiring dengan pertumbuhan ekonominya, China semakin terintegrasi dengan pasar global, meningkatkan kebutuhan akan informasi keuangan yang transparan dan dapat diperbandingkan untuk menarik investasi asing dan memfasilitasi perdagangan internasional.

Pada tahun 2006, China mengumumkan komitmennya untuk mengadopsi Standar Akuntansi Internasional (IFRS) secara penuh pada tahun 2010. Tujuan utama adopsi IFRS di China adalah untuk: Meningkatkan transparansi dan kredibilitas informasi keuangan perusahaan China di mata investor global, Meningkatkan harmonisasi standar akuntansi China dengan standar internasional, memfasilitasi perbandingan keuangan antar perusahaan di berbagai negara. Meningkatkan daya tarik investasi China bagi investor asing.

Pada tahun 2020, China meluncurkan Standar Akuntansi Nasional China (CNAS) baru, yang menggantikan Standar Akuntansi Perusahaan Bisnis (ASBE) yang telah diterapkan selama bertahun-tahun. CNAS dirancang untuk lebih kompatibel dengan IFRS dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan China. Kementerian Keuangan China terus memperbaiki dan menyempurnakan CNAS untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus berkembang.

Pemerintah China telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Hal ini termasuk memperkuat regulasi pelaporan keuangan, meningkatkan pengawasan auditor, dan meningkatkan akses publik terhadap informasi keuangan. Upaya ini bertujuan untuk membangun kepercayaan investor dan meningkatkan integritas pasar modal China. China berkomitmen untuk mengadopsi IFRS secara penuh dalam jangka panjang. Saat ini, banyak perusahaan China

yang telah mengadopsi IFRS secara sukarela, dan pemerintah mendorong lebih banyak perusahaan untuk melakukannya. Konvergensi dengan IFRS akan membantu meningkatkan daya saing perusahaan China di pasar global dan memfasilitasi investasi asing.

Akuntansi di China terus berkembang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi entitas sektor publik. Standar akuntansi sektor publik baru telah dikeluarkan dan sistem audit sektor publik diperkuat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas sektor publik menggunakan dana publik secara efisien dan efektif. Meskipun telah mengalami kemajuan pesat, akuntansi di China masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya independensi auditor di beberapa sektor, dan kompleksitas regulasi.

### Organisasi China dan Indonesia

Berikut adalah beberapa organisasi akuntansi di China:

1. Organisasi Pemerintah:
  - Kementerian Keuangan China (MOF): MOF bertanggung jawab atas perumusan dan penerapan kebijakan akuntansi di China. MOF menerbitkan standar akuntansi China (CAS) dan mengawasi penerapannya.
  - *Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA)*: CICPA adalah organisasi profesional akuntan publik di China. CICPA bertanggung jawab untuk sertifikasi akuntan publik, pendidikan dan pelatihan akuntan, dan pengembangan standar audit.
2. Organisasi Profesi:
  - *The Association of International Certified Public Accountants (AICPA)*: AICPA adalah organisasi akuntan profesional internasional dengan kantor perwakilan di China. AICPA menawarkan berbagai layanan kepada anggota di China, termasuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, dan advokasi.
  - *The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA)*: HKICPA adalah organisasi akuntan profesional di Hong Kong. HKICPA memiliki anggota yang signifikan di China daratan dan menawarkan berbagai layanan kepada mereka, termasuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, dan advokasi.
3. Organisasi Lainnya:
  - *The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*: AICPA adalah organisasi akuntan profesional terbesar di Amerika Serikat. AICPA menawarkan berbagai layanan kepada anggota di China, termasuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, dan advokasi.
  - *The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)*: CIMA adalah organisasi akuntan manajemen profesional global dengan kantor perwakilan di China. CIMA menawarkan berbagai layanan kepada anggota di China, termasuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan profesional, dan advokasi.

Berikut adalah beberapa organisasi akuntansi di Indonesia, beserta referensi tahun terbaru:

1. Organisasi Profesi:
  - **Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)**: Merupakan organisasi profesi akuntansi terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. IAI memiliki peran penting dalam perkembangan akuntansi di Indonesia, termasuk dalam penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).
  - **Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)**: Didirikan pada tahun 1971, IAMI berfokus pada akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik. IAMI juga memiliki peran dalam pengembangan pendidikan akuntansi manajemen di Indonesia.
  - **Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)**: Didirikan pada tahun 2007, IAPI berfokus pada akuntansi publik dan audit. IAPI memiliki peran penting dalam menjaga kualitas audit di Indonesia.
2. Organisasi Lainnya:
  - **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**: Merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi

keuangan negara.

- **Kementerian Keuangan Republik Indonesia:** Memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan akuntansi di Indonesia, termasuk dalam pengembangan SAK dan SPAP.
- **Perguruan Tinggi:** Banyak perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki jurusan akuntansi dan menyelenggarakan penelitian dan publikasi di bidang akuntansi.

### Sertifikat Akuntansi China dan Indonesia

Di China, terdapat beberapa sertifikat akuntansi yang penting bagi para profesional di bidang ini. Berikut beberapa di antaranya:

1. Akuntan Publik Bersertifikat (*Certified Public Accountant - CPA*)
  - Merupakan sertifikat akuntansi paling bergengsi di China, dikeluarkan oleh *Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA)*.
  - Diperlukan untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan publik dan entitas lain yang diatur.
  - Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ini termasuk lulus Ujian Akuntan Publik (AICPE), memiliki pengalaman kerja akuntansi yang relevan, dan memenuhi persyaratan pendidikan dan moral.
2. Akuntan Manajemen Bersertifikat (*Certified Management Accountant - CMA*)
  - Ditawarkan oleh *The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)*, organisasi akuntansi manajemen profesional global.
  - Memfokuskan pada akuntansi biaya, manajemen keuangan, dan pengambilan keputusan strategis.
  - Diperlukan untuk beberapa posisi manajemen senior di perusahaan.
  - Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ini termasuk lulus Ujian CMA, memiliki pengalaman kerja akuntansi yang relevan, dan memenuhi persyaratan pendidikan dan moral.
3. Akuntan Pajak Bersertifikat (*Certified Tax Accountant - CTA*)
  - Diberikan oleh *China Association of Tax Accountants (CATA)*.
  - Memfokuskan pada undang-undang dan peraturan pajak di China.
  - Diperlukan untuk beberapa pekerjaan yang terkait dengan pajak, seperti persiapan pajak dan kepatuhan pajak.
  - Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ini termasuk lulus Ujian Akuntan Pajak, memiliki pengalaman kerja pajak yang relevan, dan memenuhi persyaratan pendidikan dan moral.
4. Sertifikat Akuntansi Lainnya:
  - Selain sertifikat-sertifikat utama di atas, terdapat juga berbagai sertifikat akuntansi lain yang ditawarkan oleh organisasi profesional dan lembaga pendidikan di China.
  - Sertifikat ini biasanya fokus pada bidang akuntansi tertentu, seperti akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, atau akuntansi audit internal.

Di Indonesia, terdapat beberapa sertifikat akuntansi yang penting bagi para profesional di bidang ini. Berikut beberapa di antaranya:

1. Akuntan Publik Bersertifikat (*Certified Public Accountant - CPA*)
  - Merupakan sertifikat akuntansi tertinggi di Indonesia, dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
  - Diperlukan untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan publik dan entitas lain yang diatur.
  - Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ini termasuk lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), memiliki pengalaman kerja akuntansi yang relevan, dan memenuhi persyaratan pendidikan dan moral.
2. Akuntan Internal Bersertifikat (*Certified Internal Auditor - CIA*)
  - Ditawarkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, organisasi audit internal global.

- Memfokuskan pada pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.
  - Diperlukan untuk beberapa posisi audit internal senior di perusahaan.
  - Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ini termasuk lulus Ujian CIA, memiliki pengalaman kerja audit internal yang relevan, dan memenuhi persyaratan pendidikan dan moral.
3. Akuntan Pajak Bersertifikat (*Certified Tax Accountant* - CTA)
- Diberikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
  - Memfokuskan pada undang-undang dan peraturan pajak di Indonesia.
  - Diperlukan untuk beberapa pekerjaan yang terkait dengan pajak, seperti persiapan pajak dan kepatuhan pajak.
  - Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ini termasuk lulus Ujian Akuntan Pajak, memiliki pengalaman kerja pajak yang relevan, dan memenuhi persyaratan pendidikan dan moral.
4. Sertifikat Akuntansi Lainnya:
- Selain sertifikat-sertifikat utama di atas, terdapat juga berbagai sertifikat akuntansi lain yang ditawarkan oleh organisasi profesional dan lembaga pendidikan di Indonesia.
  - Sertifikat ini biasanya fokus pada bidang akuntansi tertentu, seperti akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, atau akuntansi biaya.

### **Perbedaan Praktik Akuntansi di Indonesia dan China: Sebuah Perbandingan**

Meskipun sama-sama menerapkan standar akuntansi internasional (IAS), terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam praktik akuntansi di Indonesia dan China. Perbedaan ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti budaya, regulasi, dan sistem perpajakan yang berbeda di kedua negara. Berikut adalah beberapa poin penting yang membedakan praktik akuntansi di Indonesia dan China:

1. Pengaruh Budaya:
  - Indonesia: Budaya Indonesia lebih mengedepankan harmoni dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat tercermin dalam praktik akuntansi yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan.
  - China: Budaya China lebih menekankan pada hierarki dan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini menghasilkan praktik akuntansi yang lebih terpusat dan mengikuti standar yang lebih ketat.
2. Standar Akuntansi:
  - Indonesia: Indonesia secara resmi mengadopsi IFRS pada tahun 2012. Namun, masih terdapat beberapa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (SAK EP) yang belum sepenuhnya konvergen dengan IFRS.
  - China: China secara bertahap mengadopsi IFRS sejak tahun 2008. Saat ini, terdapat Standar Akuntansi China (CAS) yang selaras dengan IFRS, namun masih ada beberapa perbedaan kecil, terutama dalam hal konsolidasi dan akuntansi aset tetap.
3. Penegakan Aturan:
  - Indonesia: Penegakan aturan akuntansi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Akuntan Publik (DPAP). OJK berwenang untuk menerbitkan peraturan dan mengawasi penerapannya, sedangkan DPAP bertugas mengawasi auditor dan menjaga kualitas audit.
  - China: Penegakan aturan akuntansi di China dilakukan oleh Kementerian Keuangan (MOF) dan *Chinese Institute of Certified Public Accountants* (CICPA). MOF memiliki kewenangan untuk menerbitkan standar akuntansi dan mengawasi penerapannya, sedangkan CICPA bertugas mengawasi auditor dan menjaga kualitas audit.
4. Pengungkapan:
  - Indonesia: Persyaratan pengungkapan di Indonesia umumnya mengikuti IFRS. Namun, OJK dapat mengeluarkan peraturan tambahan terkait pengungkapan informasi tertentu, seperti informasi terkait risiko dan tata kelola perusahaan. Tata

kelola perusahaan saat ini belum efektif dalam mempengaruhi praktik manajemen laba karena perusahaan cenderung hanya memenuhi syarat formal dari pemerintah tanpa mempertimbangkan efektivitas dan tujuannya secara mendalam (Karina, R., 2021).

- China: Persyaratan pengungkapan di China umumnya mengikuti CAS. MOF juga dapat mengeluarkan peraturan tambahan terkait pengungkapan informasi tertentu, seperti informasi terkait hubungan antar perusahaan dan transaksi keuangan.

#### 5. Audit:

- Indonesia: Audit laporan keuangan di Indonesia wajib dilakukan oleh auditor independen yang terdaftar di DPAP. DPAP menetapkan standar audit dan mengawasi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor terdaftar.
- China: Audit laporan keuangan di China wajib dilakukan oleh auditor independen yang terdaftar di CICPA. CICPA menetapkan standar audit dan mengawasi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor terdaftar

#### 6. Pajak:

- Indonesia: Sistem pajak di Indonesia mengikuti undang-undang pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP bertanggung jawab atas penegakan aturan pajak dan pemungutan pajak.
- China: Sistem pajak di China mengikuti undang-undang pajak yang dikeluarkan oleh Administrasi Pajak Negara (STA). STA bertanggung jawab atas penegakan aturan pajak dan pemungutan pajak.

### Perbedaan laporan Keuangan negara China dan Indonesia

Laporan keuangan diharapkan menjadi sumber informasi yang akurat dan andal karena berfungsi sebagai dasar analisis kinerja perusahaan. Namun, masih banyak kasus atau berita tentang perusahaan yang memanipulasi informasi kinerja ekonominya demi tampil sebagai perusahaan yang berkinerja baik. (Tang, S., & Fiorentina, F.,2021).

Laporan keuangan negara Indonesia dan China memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

#### 1. Standar Akuntansi:

- **Indonesia:** Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang selaras dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sejak tahun 2008.
- **China:** Menerapkan Standar Akuntansi Perusahaan China (CAS) yang dikembangkan sendiri, meskipun mengacu pada IFRS dalam beberapa aspek.

#### 2. Struktur Laporan Keuangan:

- **Indonesia:** Mengadopsi format laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- **China:** Memiliki format laporan keuangan yang mirip dengan Indonesia, namun dengan beberapa perbedaan dalam penyajian informasi.

#### 3. Penyajian Informasi:

- **Indonesia:** Laporan keuangan disajikan dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.
- **China:** Laporan keuangan disajikan dalam bahasa Mandarin dan mata uang Yuan Renminbi (RMB).

#### 4. Pengungkapan:

- **Indonesia:** Menerapkan persyaratan pengungkapan yang lebih ketat dibandingkan dengan CAS, terutama terkait dengan transaksi antar pihak berelasi dan informasi tentang risiko dan ketidakpastian.
- **China:** Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan China umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia.

#### 5. Pengawasan:

- **Indonesia:** Laporan keuangan diaudit oleh auditor independen dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- **China:** Laporan keuangan diaudit oleh auditor independen dan diawasi oleh Kementerian Keuangan China.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyelidiki perkembangan dan perbandingan praktik akuntansi di Indonesia dan China, mengungkap bahwa meskipun kedua negara telah mengadopsi Standar Akuntansi Internasional (IAS), perbedaan yang signifikan tetap ada, dipengaruhi oleh faktor budaya, regulasi, dan sistem perpajakan, yang berakibat pada variasi dalam transparansi, kualitas laporan keuangan, dan daya tarik investasi masing-masing negara.

Dalam hal sejarah dan evolusi, akuntansi di Indonesia berakar sejak era kolonial Belanda dan berkembang seiring dengan adopsi IFRS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menarik investasi asing, sedangkan di China, reformasi ekonomi sejak tahun 1970-an telah mempercepat integrasi dengan pasar global dan mendorong adopsi IFRS guna meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Meskipun kedua negara telah mengadopsi IAS, implementasinya menunjukkan variasi signifikan, di mana Indonesia telah menyelaraskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan IFRS, sementara China mengembangkan Standar Akuntansi Nasional China (CNAS) agar lebih kompatibel dengan IFRS.

Tantangan utama yang dihadapi oleh kedua negara meliputi peningkatan literasi keuangan, penegakan hukum, dan kesenjangan antara teori dan praktik akuntansi, dengan tambahan tantangan khusus di China terkait kompleksitas regulasi dan kurangnya independensi auditor. Implikasi dari temuan ini meliputi implikasi manajerial, di mana perusahaan dapat mengidentifikasi risiko dan peluang terkait perbedaan standar akuntansi dan regulasi antara kedua negara, yang penting untuk merencanakan strategi bisnis lintas negara dan mengoptimalkan operasi keuangan, serta upaya untuk memperbaiki transparansi laporan keuangan melalui harmonisasi standar akuntansi yang akan meningkatkan kredibilitas dan daya tarik perusahaan terhadap investor global serta memperkuat hubungan bisnis. Perusahaan juga harus menyesuaikan strategi pelaporan dan kepatuhan dengan standar akuntansi internasional untuk menghindari sanksi dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam aspek teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman praktik akuntansi dengan menambah wawasan tentang perbedaan dan persamaan dalam praktik akuntansi di Indonesia dan China, serta dampak dari faktor budaya, regulasi, dan perpajakan terhadap praktik tersebut, dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam implementasi standar akuntansi, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam pengembangan teori akuntansi lintas budaya.

Untuk memperkuat wawasan tentang dampak perbedaan standar akuntansi pada perusahaan, penelitian ini mempertegas pemahaman tentang bagaimana regulasi dan standar internasional memengaruhi praktik bisnis dan pelaporan keuangan. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan harmonisasi standar akuntansi antara Indonesia dan China dengan standar internasional untuk meningkatkan konsistensi dan kompatibilitas laporan keuangan, yang dapat dicapai melalui kerjasama internasional dan adopsi penuh IFRS; peningkatan penegakan aturan akuntansi dan kepatuhan melalui regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik untuk mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik serta meningkatkan kepercayaan investor; peningkatan kapasitas akuntan melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional, termasuk pengenalan kurikulum yang sesuai dengan standar internasional dan penyediaan program sertifikasi untuk akuntan; serta peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara para profesional akuntansi di kedua negara melalui pertukaran pengetahuan, seminar, dan workshop, yang diharapkan membantu dalam memahami perbedaan dan menyesuaikan praktik akuntansi yang lebih efektif dan efisien. Dengan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan akuntansi yang lebih harmonis, transparan, dan kompetitif di tingkat global, serta peningkatan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan investor di Indonesia dan China.

## DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. (n.d.). About Us. <https://us.aicpa.org/forthepublic> (The Association of International Certified Public Accountants)
- Belkaoui, A. R. (2021). *International Accounting and Reporting*. Pearson Education.
- CICPA. (n.d.). About CICPA. <https://www.cicpa.org.cn/introcicpa/> (Chinese Institute of Certified Public Accountants)
- Davies, L. (2022). Challenges in Implementing IFRS in Emerging Markets. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 35(3), 387-405.
- Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA). (n.d.). About HKICPA. <https://www.hkicpa.org.hk/>
- IAI. (2020). *Sejarah Perkembangan*. Ikatan Akuntansi Indonesia. [Ikatan Akuntansi Indonesia]. <https://web.iaiglobal.or.id/SAKIAI/Sejarah%20Perkembangan#gsc.tab=0>
- ICAEW. (2023). *Accounting in China*. <https://www.icaew.com/> (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)
- IFRS. (2020). *Adoption and Convergence*. Retrieved from <https://www.ifrs.org/adoption/convergence> (International Financial Reporting Standards)
- Itan, I., Laudeciska, L., Karjantoro, H., & Chen, R. (2023). Corporate Governance and Environmental Disclosure: Assessing The Role of Environmental Performance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(2), 132-144.
- Karina, R. (2021). Corporate governance and earnings management: Does gender matter?. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 125-135.
- Kementerian Keuangan China (MOF). (n.d.). MOF Overview. <http://www.mof.gov.cn/en/> (Kementerian Keuangan Republik Rakyat Tiongkok)
- Miller, P. (2020). *Convergence of IFRS and its Effects*. Dalam *International Financial Reporting Standards Handbook* (pp. 115-130). Kluwer Law International.
- Nobes, C., & Parker, R. (2022). *Comparative International Accounting* (14th ed.). Pearson.
- Robinson, J. (2022, May 10). Challenges and Opportunities in Implementing IFRS. Dalam *Annual Conference on Financial Reporting*. London.
- Smith, J., & Brown, K. (2021). The Impact of IFRS Adoption on Financial Reporting Quality. *International Journal of Accounting and Finance*, 19(2), 234-251.
- Sukoharsono, E. G., & Gaffikin, M. J. R. (1993). The Genesis of Accounting in Indonesia: the Dutch colonialism in the early 17th century. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 1(1), 4–26.
- Tang, S., & Fiorentina, F. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kinerja Perusahaan, Dan Management Entrenchment Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(2), 121.
- Taylor, P., & Williams, M. (2023). The Effects of IFRS Convergence on Corporate Transparency. *Global Accounting Review*, 22(1), 45-62.
- Thompson, R. (2023, August 15). Adapting to IFRS in a Changing Financial Landscape. Dalam *International Symposium on Accounting and Finance*. Tokyo.
- Wong, H. (2020). *IFRS: A Practical Guide*. Wiley.